

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan sebuah proses yang berlangsung secara berkelanjutan, mencakup berbagai dimensi kehidupan masyarakat dengan tujuan utama untuk menciptakan kesejahteraan yang merata dan berlandaskan keadilan sosial. Sasaran akhir dari pembangunan ini adalah terbentuknya tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan, sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila serta amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam implementasinya, pembangunan tidak semata-mata berfokus pada aspek ekonomi maupun pengembangan infrastruktur, tetapi juga meliputi sektor sosial yang memiliki peranan langsung dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial menjadi elemen fundamental yang harus dijalankan secara kolaboratif oleh pemerintah bersama dengan partisipasi aktif masyarakat (Nasution et al., 2023).

Kesejahteraan sosial sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak dapat tercapai tanpa adanya peran serta aktif masyarakat. Pemerintah memang memiliki tanggung jawab utama dalam menyusun kebijakan dan menyediakan fasilitas yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun partisipasi dari elemen masyarakat, termasuk generasi muda, memegang peran yang tidak kalah penting. Dengan demikian, Karang Taruna hadir sebagai organisasi sosial kepemudaan yang menjadi wadah pembinaan dan pemberdayaan pemuda di tingkat kelurahan dan desa. Organisasi ini tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menyalurkan potensi, aspirasi, dan kreativitas generasi muda, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan sosial di lingkungannya (Riyanto & Kovalenko, 2023).

Karang Taruna merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang memiliki peran strategis dalam upaya pemberdayaan sosial, khususnya dalam membina dan mengembangkan potensi generasi muda di lingkungan masyarakat. Organisasi ini tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat. Karang Taruna bersifat inklusif dan partisipatif, artinya

dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun budaya. Dengan keberadaannya yang mengakar di tingkat desa dan kelurahan, Karang Taruna memiliki fleksibilitas untuk merespons kebutuhan sosial yang beragam serta berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial (Rohman et al., 2024).

Karang Taruna diharapkan mampu menjadi motor penggerak dalam mengatasi berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, dan berbagai bentuk ketimpangan sosial lainnya. Melalui pelaksanaan program-program pembinaan dan pemberdayaan, Karang Taruna berkontribusi dalam menciptakan pemuda yang berdaya saing, berakhlak, serta memiliki kepedulian sosial. Kegiatan-kegiatan seperti pelatihan keterampilan, pembinaan kewirausahaan, kegiatan keagamaan, seni budaya, dan olahraga menjadi bagian dari upaya pembentukan karakter generasi muda yang produktif. Dengan pendekatan yang berbasis komunitas, Karang Taruna memiliki potensi besar sebagai katalisator perubahan sosial sekaligus sebagai mitra pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan sosial yang berkelanjutan (Ramadhani et al., 2025).

Dalam skala nasional karang taruna mengalami dinamika juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun kesejahteraan sosial masyarakat, sebagai salah satu contohnya karang taruna secara nasional membentuk katar e-catalog, dimana e-catalog tersebut merupakan wadah untuk barang barang lokal yang akan dijual ke masyarakat luas. Meskipun memiliki landasan yang kuat, implementasi karang taruna secara nasional menunjukkan fenomena sosial yang kompleks. Secara umum, karang taruna sering terlihat sangat aktif dalam kegiatan-kegiatan seremonial atau musiman, seperti perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, acara kebersihan lingkungan, atau kegiatan sosial temporer lainnya. Semangat gotong royong dan kebersamaan para pemuda sering kali sangat terasa dalam momen-momen ini. Namun, di luar agenda rutin tersebut, fenomena yang seringkali muncul adalah tantangan dalam menjaga keberlanjutan dan konsistensi program. beberapa tantangan utama yang dihadapi, seperti yang juga disoroti dalam penelitian akademis, meliputi:

- **Kesenjangan antara Kebijakan dan Implementasi:** Seringkali terdapat jarak antara amanat Permensos dan realitas di lapangan. Hal ini dapat

disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah, atau ketidakpahaman struktural tentang peran yang seharusnya diemban.

- **Struktur Birokrasi:** Adanya kendala "disposisi dan struktur birokrasi" yang menghambat pergerakan Karang Taruna. Ini bisa berarti bahwa pengambilan keputusan yang berbelit-belit atau kurangnya dukungan administratif dari kelurahan atau desa dapat membatasi ruang gerak dan inisiatif pemuda.
- **Kemandirian Organisasi:** Banyak Karang Taruna yang masih sangat bergantung pada dana hibah atau bantuan dari pemerintah, sehingga mereka kesulitan untuk mengembangkan program-program yang mandiri secara finansial dan berkelanjutan.
- **Partisipasi Anggota:** Partisipasi aktif anggota seringkali fluktuatif, tergantung pada daya tarik program atau kepemimpinan yang ada. Organisasi ini kadang menghadapi tantangan dalam mempertahankan minat dan keterlibatan pemuda di tengah kesibukan mereka

dan ini merupakan pekerjaan rumah bagi karang taruna secara nasional dan lokal, di Tingkat lokal karang taruna memiliki fenomena yang hampir sama. Di Karang Taruna Kelurahan Mekarjaya Kota Depok dalam partisipatif anggota masih kurang signifikan tetapi beberapa anggota memiliki pikiran inisiatif dalam berkegiatan, lalu dalam soal sarana dan prasarana sangat belum memadai untuk kita berkumpul serta berdiskusi, dalam soal anggaran juga belum cukup signifikan dalam mendukung program karang taruna sebagai bentuk penguatan terhadap eksistensi dan peran Karang Taruna, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Peraturan ini memuat ketentuan tentang kedudukan, fungsi, tugas, hak dan kewajiban, struktur organisasi, serta mekanisme pembinaan Karang Taruna oleh pemerintah dari tingkat pusat hingga ke desa atau kelurahan. Permensos ini menjadi acuan utama dalam pengelolaan organisasi Karang Taruna secara profesional dan terarah. Kehadirannya diharapkan mampu mendorong optimalisasi peran Karang Taruna sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang partisipatif dan berkelanjutan

(Roychan, 2024).

Namun demikian, implementasi Permensos No. 25 Tahun 2019 di berbagai daerah masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Banyak organisasi Karang Taruna yang belum mampu menjalankan fungsinya secara maksimal karena keterbatasan dalam aspek sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana, hingga lemahnya pemahaman terhadap isi regulasi. Selain itu, kurangnya pembinaan dan pendampingan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor yang menghambat perkembangan organisasi ini. Situasi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara substansi regulasi yang ideal dengan praktik pelaksanaannya di lapangan. Kesenjangan ini apabila tidak segera diatasi akan berdampak pada rendahnya efektivitas Karang Taruna dalam menjalankan peran sosialnya di masyarakat.

Kelurahan Mekarjaya, salah satu kelurahan di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, menjadi wilayah yang menarik untuk dikaji karena memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, yaitu mencapai 57.538 jiwa per tahun 2023. Kelurahan ini merupakan salah satu kelurahan terpadat di Kota Depok, yang mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Penduduk yang beragam dari sisi usia, pekerjaan, dan tingkat pendidikan memunculkan berbagai tantangan dalam aspek pemberdayaan masyarakat, terutama pemuda. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Depok, sekitar 30% dari jumlah penduduk Kelurahan Mekarjaya merupakan usia produktif antara 15–35 tahun, yang merupakan segmen utama sasaran program Karang Taruna (Herwati et al., 2023).

Berdasarkan hasil observasi awal, Kota Depok dan memiliki dinamika kepemudaan yang cukup aktif, memiliki beberapa unit Karang Taruna di tingkat RW (Rukun Warga) yang melaksanakan berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Namun, implementasi Permensos tersebut di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman terhadap regulasi, keterbatasan anggaran, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah kecamatan dan pengurus Karang Taruna. Hal ini terlihat dari perkembangan program Karang Taruna yang belum maksimal, sebagaimana hasil observasi peneliti di lapangan. Akan tetapi menurut Saudara Toto sebagai Tokoh Masyarakat setempat, Karang Taruna Kelurahan Mekarjaya cukup baik dalam melakukan kegiatan dan program

sebagai mitra strategis pemerintah, akan tetapi yang perlu diperbaiki dan diperhatikan adalah sebuah tindak lanjut dan efek lanjut dari sebuah kegiatan atau program tersebut yang dijalani, Patut dipertanyakan terkait eksistensi Karang Taruna Kelurahan Mekarjaya, Kota Depok, mengingat bahwa Karang Taruna di bidang kepemudaan merupakan mitra strategis pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Karang Taruna Kelurahan Mekarjaya di Kota Depok menunjukkan eksistensi yang kuat sebagai wadah pemberdayaan pemuda dan penggerak kegiatan sosial kemasayarakatan. Melalui berbagai program dan kegiatan, Karang Taruna Mekarjaya berperan aktif dalam membina generasi muda dan mendukung pembangunan lokal.

Permasalahan ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya mengenai bagaimana implementasi Permensos No. 25 Tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kelurahan Mekarjaya, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana dampaknya terhadap pembinaan Karang Taruna. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Implementasi Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok.”

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi Permensos No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok?

1.3 Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan secara mendalam implementasi *Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019* tentang Karang Taruna di Kelurahan Mekarjaya, Kota Depok. Fokus penelitian diarahkan pada analisis pelaksanaan kebijakan sesuai ketentuan peraturan, tingkat keterlibatan pemuda dalam kegiatan Karang Taruna, efektivitas struktur kelembagaan yang dibentuk, serta peran pihak terkait dalam proses pembinaan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan dan merumuskan rekomendasi strategis untuk mengoptimalkan peran

Karang Taruna sebagai sarana pemberdayaan generasi muda.

1.4 **Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hal bagaimana implementasi peraturan menteri No.25 tahun 2019 tentang Karang Taruna di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan kajian perbandingan dalam penelitian selanjutnya, khususnya untuk melengkapi penelitian tentang hal-hal yang terkait.

2. Manfaat Praktis

Kelurahan Mekarjaya serta Karang Taruna dapat menggunakan metode penelitian ini sebagai panduan dan memberikan saran yang baik dalam pembinaan Karang Taruna di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok

1.5 **Sistematika Penulisan**

Agar pelaksanaan kegiatan penelitian dapat berjalan secara sistematis dan terarah, diperlukan penyusunan struktur pembahasan yang logis dan runut. Oleh karena itu, penulisan penelitian ini disusun berdasarkan pembagian bab yang mencerminkan kerangka berpikir ilmiah dan alur analisis yang digunakan oleh peneliti. Sistematika penulisan ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan teknis dalam penyusunan laporan, tetapi juga bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dan maksud dari setiap tahapan penelitian. Secara umum, penelitian ini terdiri atas lima bab utama, yang masing-masing membahas aspek-aspek penting secara berurutan, mulai dari latar belakang masalah hingga kesimpulan dan saran yang dapat dijadikan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat uraian awal yang menjadi fondasi utama dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini mencakup latar belakang masalah yang menguraikan secara mendalam konteks dan urgensi dari topik yang diangkat. Selanjutnya, dirumuskan pokok permasalahan atau rumusan masalah yang menjadi fokus utama kajian. Penjelasan mengenai tujuan penelitian akan menjabarkan secara eksplisit arah dan capaian yang ingin diperoleh melalui proses penelitian ini. Selain itu, dijabarkan pula manfaat atau faedah penelitian yang mencakup kontribusi teoritis maupun praktis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan kebijakan sosial. Pada bagian akhir bab ini, dijelaskan pula sistematika penulisan laporan penelitian, sebagai panduan untuk memahami alur dan isi dari setiap bab secara runut dan terstruktur.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan pembahasan teoretis yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan penelitian. Tinjauan pustaka meliputi konsep-konsep dan teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian, serta hasil-hasil studi terdahulu yang mendukung kerangka berpikir peneliti. Literatur-literatur yang digunakan berasal dari berbagai sumber akademik terpercaya, baik dari buku referensi, jurnal ilmiah, laporan penelitian, maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Teori yang digunakan akan dijadikan acuan dalam menganalisis fenomena sosial yang dikaji. Selain itu, pada bagian ini juga dibahas kerangka teori dan kerangka pemikiran yang menjembatani antara teori dan fenomena empiris. Penjelasan mengenai kesenjangan penelitian (research gap) juga dikemukakan untuk memperkuat posisi dan orisinalitas penelitian ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara sistematis metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Dimulai dari pendekatan penelitian yang dipilih,

yaitu pendekatan kualitatif yang berfokus pada pendalaman makna dan konteks dari fenomena sosial yang diteliti. Selanjutnya, dijelaskan jenis penelitian yang digunakan, yaitu deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh dan mendalam mengenai implementasi kebijakan sosial. Bagian ini juga mencakup teknik pengumpulan data, seperti wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan mengacu pada tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selain itu, dijelaskan pula teknik uji keabsahan data melalui triangulasi sumber maupun metode, untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh dapat dipercaya dan valid. Dengan demikian, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini disusun secara cermat untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan bermakna secara ilmiah.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari laporan penelitian karena memuat analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan di lapangan. Pembahasan diawali dengan gambaran umum mengenai organisasi Karang Taruna, termasuk latar historis, struktur organisasi, fungsi, dan perannya dalam pemberdayaan generasi muda di tingkat kelurahan. Selanjutnya, dijelaskan kondisi riil Karang Taruna di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok, berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Fokus utama dalam bab ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Menteri Sosial No. 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna, termasuk strategi pelaksanaan, tingkat pemahaman pengurus dan anggota, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori-teori yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, sehingga diperoleh pemaknaan ilmiah terhadap fenomena yang dikaji.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir ini berisi simpulan yang merupakan hasil akhir dari proses analisis dan interpretasi data selama penelitian berlangsung. Simpulan

disusun berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, disampaikan pula saran-saran yang bersifat aplikatif dan konstruktif, baik bagi pemerintah, lembaga Karang Taruna, masyarakat, maupun peneliti selanjutnya. Saran-saran tersebut ditujukan untuk memperbaiki dan mengembangkan implementasi kebijakan sosial, khususnya dalam pemberdayaan Karang Taruna di tingkat kelurahan. Penutup ini juga berfungsi sebagai refleksi dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan, serta memberikan arah lanjutan bagi penelitian sejenis di masa mendatang.

